

BAB III

PRAKTIK REKONSTRUKSI DAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SERTA PENGATURAN REKONSTRUKSI DI INDONESIA

A. Kasus yang Dalam Proses Penyidikan Menggunakan Rekonstruksi dan Tidak, Serta Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah

Kasus-kasus pelanggaran asas praduga tidak bersalah milik tersangka yang terjadi selama proses rekonstruksi yang disengaja maupun yang tidak disengaja sudah marak di Indonesia. Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini antara lain kasus yang menimpa Andi Haniati yang dituduh mencuri dokumen akta kelahiran anaknya yang dituduh oleh mantan suaminya, kasus pembunuhan Raafi oleh Febry yang diduga melakukan pengroyokan dan penusukan terhadap saudara Raafi bersama teman-temannya.

Kasus-kasus tersebut sebagian menggunakan rekonstruksi dan juga ada yang tidak menggunakan rekonstruksi sebagai salah satu metode teknik dalam penyidikan. Berikut adalah seberapa ringkasan kasus-kasus tersebut:

1. Kasus Pencurian Akta Kelahiran yang Dilakukan Andi Haniati

Kasus ini bermula dari perceraian yang terjadi antara tersangka Andi Haniati dan korban Bonature Silaban yang terjadi pada tanggal 16 November 2006. Dari hasil pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Jonathan Bona Junior Silaban. Ketika tersangka dan korban

memutuskan berpisah, sang anak dibawa oleh korban untuk tinggal bersama korban. Selanjutnya pada bulan Oktober 2007 tersangka menyambangi rumah korban di Tanjung Mas Raya Blok D-6 No.22 untuk bertemu dengan anaknya di dalam kamar tidur korban karena korban akan berangkat kerja. Sebelum korban berangkat bekerja, korban sempat menunjukkan 1 buah map yang berisi.⁸⁰

- a) Asli 1 lembar Akte kelahiran a.n Jonathan Bona Junior Silaban dengan No. AL.500.0388751 yang dikeluarkan oleh sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.
- b) Asli 1 lembar akte kenal lahir dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban.
- c) Asli 1 lembar medical record dari RS. Balikpapan an. Jonathan Bona Junior Silaban.
- d) Asli 1 lembar medical record dari RS. Horas Insani Siantar Sumatera Utara an. Jonathan Bona Junior Silaban.
- e) Asli surat perjanjian hak asuh antara korban dan terdakwa terhadap Jonathan Bona Junior Silaban.

Selanjutnya korban pergi meninggalkan tersangka di dalam kamar, dimana map yang berisi dokumen tersebut diletakkan di atas meja dalam kamar tersebut. Ketika sudah larut malam korban mengantarkan tersangka untuk pulang kerumah keluarganya. Sesampainya di rumah

⁸⁰ Putusan PN Jakarta Selatan No. 104/PidB/2012/PN.Jkt.Sel

setelah mengantarkan tersangka korban tidak melihat map yang berisi dokumen anak mereka di dalam kamar korban, atas kehilangan tersebut pada bulan Agustus 2011 korban melaporkan tersangka atas tindak pidana pencurian.⁸¹ Atas laporan tersebut tersangka dijemput paksa oleh tim dari kepolisian Jakarta Selatan di kediaman tersangka di Balikpapan. Sesampainya di Jakarta tersangka di konfrontasi dengan saksi yang lainnya.⁸² Setelah konfrontasi tersebut, tersangka ditahan 1 hari oleh penyidik Polresta Jakarta Selatan. Keesokan harinya tersangka dilepaskan dengan jaminan keluarga korban dan penasihat hukum tersangka yang mempertanyakan alasan penahanan korban dikarenakan belum adanya barang bukti, keterangan saksi yang mengatakan melihat dengan mata kepala sendiri yang menyatakan bahwa tersangkalah yang mencari map yang berisi dokumen kelahiran anak tersangka. Setelah beberapa kali menjalani wajib lapor ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jakarta Selatan tersangka mendapatkan surat panggilan resmi untuk melakukan rekonstruksi.⁸³ Pada waktu pelaksanaan rekonstruksi tanggal 22 Desember 2011 di TKP terjadi perdebatan antara penasihat hukum tersangka yakni Andi Faisal, S.H. dengan para penyidik. Kuasa hukum dan tersangka menolak mengikuti dan memperagakan rekonstruksi karena beranggapan semua yang diperagakan dalam rekonstruksi karena beranggapan semua yang diperagakan dalam rekonstruksi tidak sesuai

⁸¹ *Ibid*

⁸² Hasil wawancara dengan tersangka Andi Haniati melalui surat elektronik, tanggal 13 Oktober 2017.

⁸³ *Ibid*

dengan BAP yang dibuat atas nama tersangka dan semua saksi. Namun tersangka tetap dipaksa untuk mengikuti rekonstruksi dengan alasan jika ada keberatan dapat disampaikan di kantor dan jika tetap menolak mengikuti rekonstruksi tersangka dan penasihat hukumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang telah menghalangi penyidikan.⁸⁴ Setelah rekonstruksi selesai tersangka dan kuasa hukumnya langsung menuju Polresta Jakarta Selatan untuk membuat BAP hasil Rekonstruksi. Ketika BAP selesai dibuat, tersangka menolak menandatangani BAP tersangka ditahan kembali tanpa ada alasan yang jelas mengapa tersangka harus ditahan kembali. Setelah 20 hari masa penahanan tanpa pemberitahuan yang jelas mengenai perkembangan kepada tersangka ataupun kuasa hukumnya penyidik telah melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan statusnya telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa.⁸⁵

Sampai pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 104/Pid.B/2012/PN.Jkt. Sel pada tanggal 16 April 2012 yang menjelaskan dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Andi Haniati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tuduhan yang dilaporkan oleh korban, membebaskan terdakwa Andi Haniati dari dakwaan, memerintahkan agar terdakwa Andi Haniati

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

2. Kasus Pembunuhan Raafi yang dilakukan oleh saudara Febry

Kasus berawal dari keributan yang dilakukan oleh saudara Febry dan teman temannya kepada korban Raafi di suatu klub malam di Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2011 pukul 22.00, korban Raafi mendapat luka tusukan atas kejadian tersebut, atas kejadian tersebut polisi menetapkan tersangka utamanya ialah saudara Febry. Selama proses penyidikan Febry tidak diberikan bantuan penasihat hukum dan dalam pembuatan BAP pun Febry sering dalam kondisi tertekan dan berada di bawah ancaman fisik dari para penyidik. Pada saat di damping LBH pers Jakarta Selatan, Febry baru berani menyampaikan hal sebenarnya dan mencabut BAP yang telah dibuat sebelumnya, dimana BAP terdahulu telah disesuaikan skenarionya oleh penyidik agar sesuai dengan BAP. Pada saat Rekonstruksi dilakukan pihak penyidik masih memaksakan Febry untuk melakukan peran sesuai kehendak penyidik tersebut. Namun hal ini telah ditolak oleh Febry dan kuasa hukumnya karena tidak sesuai fakta dan akhirnya rekonstruksi tetap dilakukan namun dilakukan oleh peran pengganti. Setelah rekonstruksi dilakukan pada proses pemeriksaan selanjutnya Febry mencabut keterangannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana. Keterangan Febry sebelumnya

diakui tidak sesuai fakta lantaran Febry saat itu dalam keadaan tertekan, takut dan syok saat ditangkap oleh aparat.⁸⁶

Saat persidangan terkuak fakta baru, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Jakarta Selatan memvonis bebas saudara Muhammad Febry Awan alias Febry “Mengadili tidak terbukti secara sah trhadap terdakwa atas tindak pidana pembunuhan, pengroyokan, dan penganiayaan. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Oleh Majelis Hakim M. Razaad di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan terdakwa dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan menyatakan pemulihan hak.⁸⁷

B. Rekonstruksi

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, rekonstruksi adalah suatu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi. Ada beberapa pengertian rekonstruksi menurut bebrapa sarjana maupun sumber-sumber buku. Pengertian rekonstruksi menurut Poerwadarminta adalah

⁸⁶ <http://www.viva.co.id/berita/metro/302956-terdakwa-penusuk-raafi-saya-bukan-pelaku>

⁸⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/febry-divonis-bebas-siapa-pembunuh-raafi-sebenarnya.html/Rabu, 1 Agustus 2012, pukul 07:09>

pengembalian sebagai semula, sedang merekonstruksi adalah mengembalikan (memulihkan sebagai semula).⁸⁸

Rekonstruksi menurut Romli Atmasasmita adalah satu cara investigasi yang dilakukan penyidik untuk membuat terang kejadian tindak pidana ketika dalam proses penyidikan sebelumnya tersangka mengaku lupa dan terdapat beberapa perbedaan dalam keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi yang ada.⁸⁹ Sedangkan menurut Andi Hamzah, Rekonstruksi artinya penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.⁹⁰

Dalam kepolisian, rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat

⁸⁸ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1996

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Prof.Romli Atmasasmita, tanggal 7 Oktober 2017, jam 14.00

⁹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT: Ghalia Indonesia, hlm.52.

diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam rekonstruksi.⁹¹

Selain teknik pemeriksaan rekonstruksi juga dikenal teknik pemeriksaan interogasi dan konfrontasi dalam rangka proses penyidikan suatu perkara pidana. Interogasi merupakan teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran ketertiban tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Sedangkan konfrontasi adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dilaungkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi.⁹²

Kewenangan melaksanakan rekonstruksi perkara pidana oleh penyidik dalam SK KAPOLRI tersebut diatas dilakukan pada saat pemeriksaan tersangka ataupun saksi, yang mana pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun

⁹¹ SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana,hlm.248.

⁹² *Ibid*

tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan diluangkan didalam berita acara pemeriksaan. Urgensi dan dilakukannya rekonstruksi itu sendiri kembali kepada keyakinan penyidik, apakah penyidik yakin tanpa melakukan rekonstruksi sudah dapat melimpahkan berkas ke jaksa atau belum.⁹³ Jika merasa sudah cukup maka tidak perlu dilakukan rekonstruksi tetapi jika tidak ada kesuaian keterangan saksi yang ada dan keterangan tersangka disinilah pentingnya rekonstruksi dilakukan guna terangnya tindak pidana yang sesungguhnya terjadi.⁹⁴

2. Tata Cara pelaksanaan Rekonstruksi

Jika seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melakukan beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materil (KUHP). Sebagai sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip koordinasi yang dianut KUHAP maka pelaksanaan rekonstruksi itu dapat dilakukan kapan saja. Asal perkara

⁹³ Hasil wawancara dengan penyidik Polres Jakarta Selatan di Polres Jakarta Selatan, tanggal 18 oktober 2017

⁹⁴ Hasil wawancara dengan penyidik Polres Jakarta Selatan di Polres Jakarta Selatan, tanggal 18 oktober 2017

dimaksud masih dalam tahap pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.⁹⁵

Mengenai tempat pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana maka menurut SK KAPOLRI hal tersebut dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), yakni tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya atau tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Namun, secara umum setiap tempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Menurut PAF Lamintang, tempat kejadian perkara ialah tempat dimana telah dilakukan suatu tindak pidana, sedangkan dalam KUHAP tidak dikenal istilah TKP melainkan dipergunakan istilah tindakan pertama pada saat di “tempat kejadian” (pasal 7 ayat 1 huruf b).⁹⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan penyidik Polres Jakarta Selatan, rekonstruksi dimulai dari beberapa tahapan, yakni:⁹⁷

- a. Pemeriksaan para saksi
- b. Membuat scenario rekonstruksi

⁹⁵ Dwi Wahyuni, “Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain”, [http://Sinta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr,\[4/12/2016\]](http://Sinta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr,[4/12/2016])

⁹⁶ PAF. Laminating, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung, PT: Sinar Baru, 1984, hlm, 76.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan penyidik Polres Jakarta Selatan di Polres Jakarta Selatan, tanggal 18 Oktober 2017

- c. Mempersiapkan alat peraga
- d. Mempersiapkan unit investigasi
- e. Mempersiapkan personil
- f. Pelaksanaan rekonstruksi serta pengambilan foto-foto kegiatan
- g. Membuat berita acara rekonstruksi.

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang, dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati. Secara teknis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik akan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada saat pembuktian di depan sidang pengadilan.

Dalam SK kejaati dalam melakukan suatu penyidikan perkara, terutama pada tahap pelaksanaan rekonstruksi, maka penyidik perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:⁹⁸

1. Rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara.

⁹⁸ SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana,hlm,250.

3. Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.

Dari petunjuk diatas, dapat dilihat bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang kurang jelas dalam perkara dan setiap peragaan perlu diambil fotonya. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya. Gerson. W. Bawengan menerangkan bahwa penyidik dalam menyelenggarakan rekonstruksi harus didasarkan oleh keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur, dan sebagainya. Perlu diulangi lagi misalnya dimana letaknya suatu benda, dimana tempat gerakan-gerakan para korban jika ada, serta bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimanakah aksi dan reaksi pada waktu itu.⁹⁹

Selain karena hak yang dimiliki oleh tersangka untuk tidak mengikuti dan menolak rekonstruksi, alasan lainnya dikarenakan pengaturan rekonstruksi itu sendiri yang berada dalam SK KAPOLRI

⁹⁹ Gerson W. Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT: Praditya Pramitha, Jakarta, 1989, hlm.38.

tidak berlaku bagi khalayak umum dan hanya berlaku bagi internal penyidik kepolisian saja.¹⁰⁰

Dengan demikian, dari hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa rekonstruksi pada dasarnya merupakan suatu alat atau cara untuk memantapkan sebuah perihal yang masih dianggap kabur, yang diadakan oleh penyidik. Dan untuk melaksanakan rekonstruksi suatu kasus, penyidik harus memiliki bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti tersebut penyidik sudah dapat menyusun sebuah teori tentang peristiwa pidana yang terjadi, akan tetapi untuk menguji kebenaran teori yang diambil harus diselenggarakan rekonstruksi.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Prof. Romli Atmasismita, tanggal 7 Oktober 2017